

Dugaan Korupsi XT Square, Penyidik akan Panggil Dua Calon Tersangka XT Square



Ilustrasi: pancurbatu.wordpress.com

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kejati DIY menyatakan masih terus fokus untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi XT Square. Korps Adhyaksa Yogyakarta menargetkan bulan April ini akan merampungkan berkas untuk dua tersangka.

“Kemarin kan kita terganjal klarifikasi dari BPK untuk menjelaskan kerugian negara, sekarang ini sudah selesai. Tinggal memeriksa untuk dua tersangkanya,” kata Asisten Pidana Khusus, Azwar Minggu (17/4/2016).

Berdasarkan penyidikan terhadap siapa yang bertanggungjawab masalah kerugian keuangan negara itu, dipastikan akan muncul dua nama tersangka. Dijadwalkan pada pertengahan April ini akan memenuhi panggilan penyidik.

“Kita ungkapkan nanti setelah usai pemeriksaan saja untuk menghindari celah pra peradilan,” kata Azwar saat ditanyakan nama dan peran mereka dalam kasus yang diduga telah merugikan negara Rp2,4 miliar tersebut.

Meski demikian, terhadap dua calon tersangka ini, penyidik sudah mengantongi bukti kuat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Terkait kemungkinan penambahan calon tersangka, Azwar masih perlu mendalami hasil pemeriksaan.

“Baru dua calon tersangka itu yang dianggap sebagai pihak yang paling baertanggungjawab, selebihnya masih akan kami evaluasi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh alat bukti diantaranya kelebihan bayar Pemkot Yogyakarta ke pihak rekanan.

Volume pekerjaan dan spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak, serta proses pembayaran ke rekanan yang menyimpang dari aturan.

Pembangunan XT Square dilakukan secara bertahap. Tahap I dilakukan tahun 2008 meliputi pembangunan basement atrium di bagian tengah.

Tahap II tahun 2009 membangun Blok D-1 yang terletak di bagian depan. Tahap III di tahun 2010 berupa penyempurnaan bangunan.

Rincian kerugian Negara berturut-turut pada 2008 sebesar Rp 235,8 juta, pada 2009 sebesar Rp 1,4 miliar, dan 2010 sebesar Rp 790,5 juta.

Angka muncul dalam penyelidikan Kejari Kota Yogyakarta, namun hanya dianggap sebagai mal administrasi.

Kejati DIY mengklaim menemukan fakta baru kemudian menyidik kasus itu sejak bulan Oktober 2015.

Sejak dimulainya penyidikan penyidik telah memanggil 20 orang saksi dari berbagai pihak, termasuk dari PNS Pemerintah Kota Yogyakarta.(tribunjogja)

Sumber Berita :

1. Tribun jogja: Tanggal 12 April 2016, Dugaan Korupsi XT Square, Penyidik akan Panggil Dua Calon Tersangka XT Square
2. Kedaulatan Rakyat: Tanggal 8 Maret 2016, Calon tersangka XT Square mengerucut

Catatan:

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain disebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 menyebutkan :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

XT Square merupakan tempat wisata baru milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang saat ini dikelola oleh sebuah perusahaan milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bernama Jogjatama Visessa. Tempat wisata ini menyatakan dirinya sebagai pusat kesenian dan kerajinan kota Yogyakarta, yang mengembangkan konsep “*what to see*”, “*what to eat*”, dan “*what to buy*” atau mereka sebut sebagai konsep *ONE STOP SHOPPING* untuk membedakan dirinya dari tempat wisata lain.